

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019

Ari Nur Wardhani
Program Studi D3 Akuntansi
Universitas Putra Bangsa Kebumen
arinurwardhani29@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Metode penelitian ini deskriptif kuantitatif untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan dengan rasio, data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah sudah tergolong sangat baik. Tingkat kemandirian daerah tergolong sedang atau partisipatif. Rasio efektivitas PAD tingkat efektivitas tergolong sangat efektif dan rasio efisiensi keuangan Provinsi Jawa Tengah tergolong efisien. Rasio keserasian masih diprioritaskan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan, PAD, belanja operasi, dan belanja modal rata-rata mengalami pertumbuhan yang positif namun masih fluktuatif. Sedangkan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*) Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik.

Kata Kunci: Kinerja pengelolaan keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

Abstract

*This study aims to determine the ability of financial management performance in the Central Java Provincial Government from 2014 to 2019. This research method is descriptive quantitative to measure financial management performance with ratios, the data used is secondary data in the form of Budget Realization Reports. Based on the results of the study, the ratio of the degree of fiscal decentralization of the local government is classified as very good. The level of regional independence is classified as moderate or participatory. The effectiveness ratio of PAD's effectiveness level is classified as very effective and the financial efficiency ratio of Central Java Province is classified as efficient. The compatibility ratio is still prioritized for operating expenditures rather than for capital expenditures. Growth rates of income, PAD, operating expenditures, and capital expenditures on average experienced positive growth but remained volatile. While the ratio of the ability to repay loans (*Debt Service Coverage Ratio*) of Central Java Province is very good.*

Keywords: Financial management performance, degree of fiscal decentralization ratio, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, compatibility ratio, growth ratio and loan repayment capacity ratio (*Debt Service Coverage Ratio*).

PENDAHULUAN

Semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan keuangan di daerah masing-masing.

Penerapan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Samad dan Iyan (2013) dalam Wati dan Fajar (2017: 60) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bentuk Ketentuan Umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sumarjo (2010) dalam Wahyudin dan Sugianal (2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai (Rasdalima, *et al.*, 2017: 135). Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah. PAD merupakan sumber utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemampuan daerah, pemerintah melakukan upaya dalam menggali kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Menurut Boedi (2012: 185) menyatakan bahwa untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PAD Provinsi Jawa Tengah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai 2019. Gambaran kenaikan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tabel sebagai berikut:

**Tabel I.1 Realisasi PAD dan Anggaran PAD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)
2014	9.916.358.231.432	8.347.874.665.000
2015	10.904.825.812.504	11.696.822.243.000
2016	11.541.029.720.310	13.810.924.605.000
2017	11.967.160.406.000	11.967.160.406.000
2018	12.994.933.643.000	12.994.933.643.000
2019	14.112.159.378.000	14.112.159.378.000

Sumber: www.djpk.kemenkeu

Berdasarkan Tabel I.1 dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan asli daerah setiap tahun mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan pada anggaran PAD, tetapi untuk tahun selanjutnya mengalami kenaikan kembali. Hal itu terjadi karena banyak pemasukan pendapatan daerah yaitu salah satunya pajak dan retribusi daerah dan terus menerus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019. Kontribusi yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk PAD menjadi sumber pendapatan pokok daerah dan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan transfer setiap tahun lebih besar dari pendapatan daerah, hal itu terjadi karena terjadinya subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonomi maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah. Hal itu mengakibatkan rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah dan kurangnya usaha, kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan analisis kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Judul penelitian ini adalah **“Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Pengelolaan Keuangan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019 dengan menggunakan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran.

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Laporan keuangan (Prmono, 2014:88) adalah gambaran neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu.

Tujuan dari laporan keuangan (Prmono, 2014:89) adalah menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis keuangan selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur. Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun (t)

TPD = Total Pendapatan Daerah tahun (t)

Tabel II.1

Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat baik

Sumber: Anita Wulandari (2001:22) dalam Latuny (2016)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Wahyudin dan Sugianal, 2017).

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

Tabel II.2

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultatif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2007:232) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1774)

1. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

Tabel II.3

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.4

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisiensi
Sama dengan 100	Efisiensi Berimbang
Di bawah 100	Efisiensi

Sumber : Mahmudi (2011:171) dalam Rahmawati dan Putra (2016:1775)

5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (operasi) dan belanja pembangunan (modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2014:8):

a. Rasio Belanja Rutin (Operasional)

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

b. Rasio Belanja Pembangunan (Modal)

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

6. Rasio Pertumbuhan

Halim dan Kusufi (2014:L-12) dalam Saputra (2017:6) Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Total Pendapatan Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Operasi Tahun } p-1}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p - \text{Tahun } p-1}{\text{Realisasi Belanja Modal Tahun } p-1}$$

Keterangan:

p = Tahun yang dihitung

p-1 = Tahun sebelumnya

7. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Ketentuan yang menyangkut persyaratan pinjaman adalah:

1. Jumlah kumulatif pinjaman yang wajib dibayar maksimal 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.
4. *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 2,5%.

Rumus yang digunakan untuk menghitung DSCR adalah:

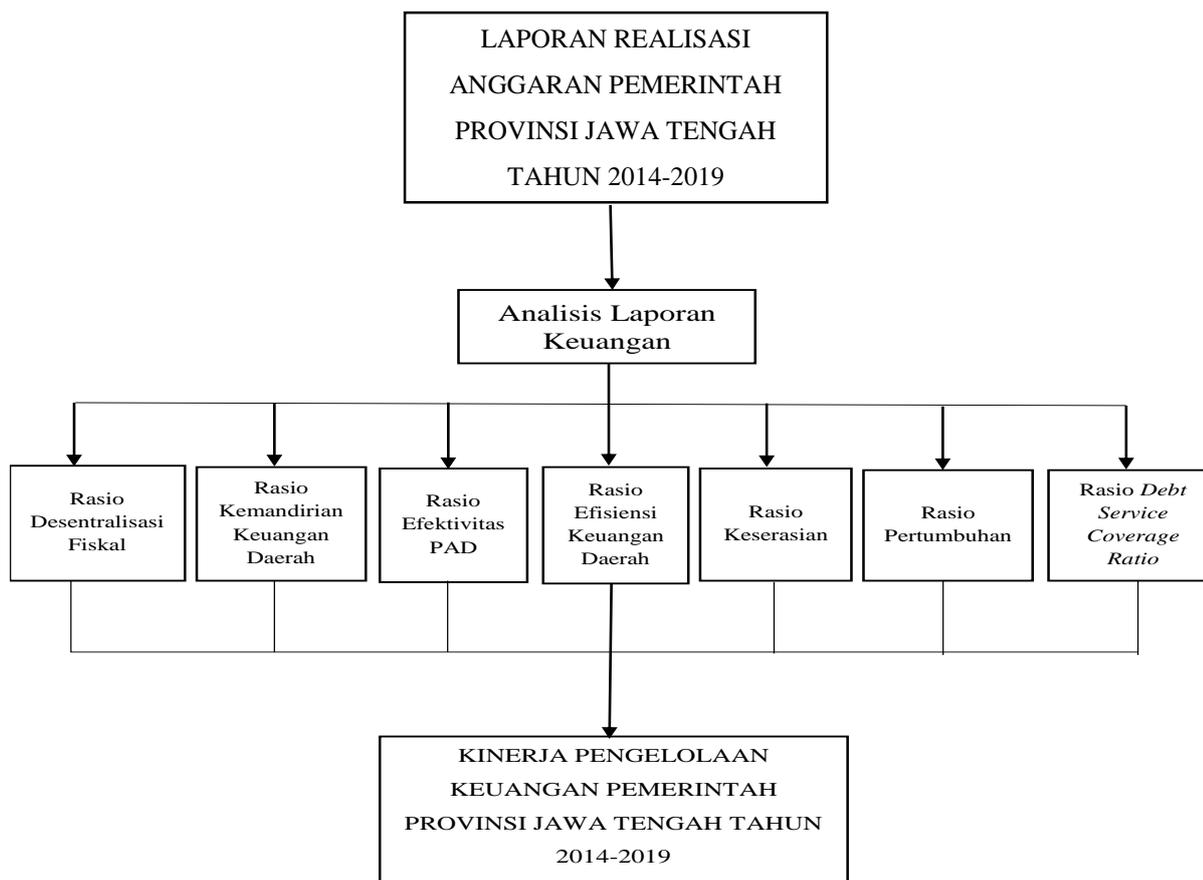
$$DSCR = \frac{PAD+BD+DAU-BW}{\text{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
 BD = Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya.
 DAU = Dana Alokasi Umum
 BW = Belanja wajib yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
 Pokok Angsuran = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan
 Bunga = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan
 Biaya Pinjaman/lainnya = Biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen, denda)

Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel yang akan diteliti maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**



METODE

Objek dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan data angka hasil analisis dan kemudian ditarik kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumenter yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), seperti data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id.

Definisi operasional variabel yang mencakup beberapa rasio yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemampuan membayar kembali pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis laporan keuangan yaitu menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat” (Pramono 2014: 90).

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 yang diperoleh dari situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel IV.1 Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2014	9.916.358.231.432	15.157.460.004.461	65,42	Sangat baik
2015	10.904.825.812.504	16.828.153.996.157	64,80	Sangat baik
2016	11.541.029.720.310	19.632.577.136.890	58,79	Sangat baik
2017	12.547.513.389.400	23.703.174.631.507	52,94	Sangat baik
2018	13.711.836.037.849	24.702.318.190.582	55,51	Sangat baik
2019	14.437.914.236.398	25.859.780.137.936	55,83	Sangat baik

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Menurut uraian dari perhitungan dapat disimpulkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2014-2019 pendapatan asli daerah memiliki kemampuan keuangan daerah sangat baik dalam membiayai pembangunan daerah dalam skala interval >50,01%. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah dan total pendapatan di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun relatif besar dan mengalami kenaikan.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel IV.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2014	9.916.358.231.432	10.206.198.269.932	97,16	Delegatif
2015	10.904.825.812.504	10.908.464.036.012	99,97	Delegatif
2016	11.541.029.720.310	16.936.595.794.396	68,14	Partisipatif
2017	12.547.513.389.400	20.766.814.798.000	60,42	Partisipatif
2018	13.711.836.037.849	21.354.117.696.000	64,21	Partisipatif
2019	14.437.914.236.398	22.843.518.703.000	63,20	Partisipatif

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 secara keseluruhan dapat dikatakan sudah cukup baik, ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari pusat

sudah mulai berkurang, ini dapat dibuktikan dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak dan pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

3. Rasio Efektivitas PAD

Tabel IV.3 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	REPAD (%)	Kriteria
2014	9.916.358.231.432	8.347.874.665.000	118,79	Sangat Efektif
2015	10.904.825.812.504	11.696.822.243.000	93,23	Cukup Efektif
2016	11.541.029.720.310	13.810.924.605.000	83,56	Kurang Efektif
2017	12.547.513.389.400	11.967.160.406.000	104,85	Sangat Efektif
2018	13.711.836.037.849	12.994.933.643.000	105,52	Sangat Efektif
2019	14.437.914.236.398	14.112.159.378.000	102,31	Sangat Efektif

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas bahwa Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan bahwa Pengelolaan

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 2017 2018 dan 2019 sangat efektif, karena

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

nilai persentase efektivitas yang diperoleh sudah lebih dari 100%. Pada tahun 2015-2016 kriteria efektivitasnya yaitu

cukup efektif dan kurang efektif karena nilai yang diperoleh dibawah 100%.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel IV.4 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2014	15.086.065.034.422	15.157.460.004.461	99,53	Efisien
2015	17.820.760.495.342	16.828.153.996.157	105,90	Tidak Efisien
2016	19.354.374.825.983	19.632.577.136.890	98,58	Efisien
2017	22.884.713.018.754	23.703.174.631.507	96,55	Efisien
2018	24.478.632.557.339	24.702.318.190.582	99,09	Efisien
2019	26.151.062.842.457	25.859.780.137.936	101,13	Tidak Efisien

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2014 efisiensi keuangan daerah sebesar 99,53% pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 105,90%. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 98,58%, tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 96,55%. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 99,09% dan tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 101,13%.

Menurut uraian di atas pada tahun 2014,2016,2017 dan 2018 efisiensinya tergolong efisien karenan nilai yang di peroleh dibawah 100% dan total belanja lebih kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan. Sedangkan tahun 2015 dan 2019 efisiensinya tergolong tidak efisien disebabkan nilai yang diperoleh lebih dari 100% dan total belanja lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan.

5. Rasio Keserasian

a. Rasio belanja operasional

Tabel IV.5 Perhitungan Rasio Keserasian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Operasi)

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasional %
2014	11.117.699.785.604	15.086.065.034.422	73,70
2015	12.690.256.149.029	17.820.760.495.342	71,21
2016	14.045.265.019.369	19.354.374.825.983	72,57
2017	18.048.854.087.657	22.884.713.018.754	78,87
2018	18.754.174.293.577	24.478.632.557.339	76,61
2019	18.766.603.725.127	26.151.062.842.457	71,76

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas pada tahun 2014 rasio belanja operasinya sebesar 73,70%. Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 71,21%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 72,57% dan mengalami kenaikan kembali tahun 2017 sebesar 78,87%. Tahun 2018 turun menjadi 76,61% dan mengalami penurunan kembali tahun 2019 menjadi 71,76%.

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

b. Rasio belanja modal

Tabel IV.6 Perhitungan Rasio Keserasian
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 (Belanja Modal)

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal %
2014	3.968.365.248.818	15.086.065.034.422	26,30
2015	5.130.504.346.313	17.820.760.495.342	28,79
2016	5.309.109.806.614	19.354.374.825.983	27,43
2017	4.835.858.931.097	22.884.713.018.754	21,13
2018	5.724.458.263.762	24.478.632.557.339	23,39
2019	7.384.459.117.330	26.151.062.842.457	28,24

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas Rasio Belanja Modal tahun 2014 sebesar 26,30% naik menjadi 28,79% pada tahun 2015. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 27,43% dan mengalami penurunan kembali tahun 2017 menjadi 21,13%. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23,39% dan tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 28,24%.

Menurut uraian dan perhitungan pada Rasio Keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal kinerja

keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 belum stabil dalam keserasian belanja operasi dan belanja modal. Karena sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal masih relatif kecil.

6. Rasio Pertumbuhan

Tabel IV.7 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD dan Pendapatan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2014	9.916.358.231.432	15.157.460.004.461	-	-
2015	10.904.825.812.504	16.828.153.996.157	9,97	11,02
2016	11.541.029.720.310	19.632.577.136.890	5,83	16,67
2017	12.547.513.389.400	23.703.174.631.507	8,72	20,73
2018	13.711.836.037.849	24.702.318.190.582	9,28	4,22
2019	14.437.914.236.398	25.859.780.137.936	5,30	4,69
	Rata-rata		7,82	11,46

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan pada realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2015 sebesar 9,97%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,14% menjadi 5,83%, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya..

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,89% menjadi 8,72%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp10.572.698.332.610, retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp371.072.481.501, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,56% menjadi 9,28, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp11.507.119.643.262, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp459.626.767.964, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.640.219.481.700. Namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan 3,98% menjadi 5,30%, namun dalam hal ini pendapatan asli daerah yang

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan pendapatan asli daerah yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan di atas bahwa rasio pertumbuhan pada realisasi penerimaan pendapatan tahun 2015 sebesar 11,02%, hal ini disebabkan total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,65% menjadi 16,67%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp9.672.518.189.424, retribusi daerah naik menjadi Rp106.225.058.566, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp340.397.111.367, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.421.889.360.953, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami mengalami kenaikan kembali sebesar 4,06% menjadi 20,73%, hal ini disebabkan

pendapatan asli daerah pada pajak daerah mengalami kenaikan menjadi Rp10.572.698.332.610, retribusi daerah naik menjadi Rp107.372.397.279, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik menjadi Rp371.072.481.501, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik menjadi Rp1.496.370.178.010, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 16,51% menjadi 4,22%, hal ini disebabkan pendapatan asli daerah pada retribusi daerah mengalami penurunan menjadi Rp104.870.144.923, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar -0,47 menjadi 4,69%, namun dalam hal ini total penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan penerimaan pendapatan yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tabel IV.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional dan Belanja Modal
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019

Tahun	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Operasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	11.117.699.785.604	3.968.365.248.818	-	-
2015	12.690.256.149.029	5.130.504.346.313	14,14	29,29
2016	14.045.265.019.369	5.309.109.806.614	10,68	3,48
2017	18.048.854.087.657	4.835.858.931.097	28,50	-8,91
2018	18.754.174.293.577	5.724.458.263.762	3,91	18,38
2019	18.766.603.725.127	7.384.459.117.330	0,07	29,00
Rata-rata			11,46	10,56

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja operasional tahun 2015 sebesar 14,14%, hal ini disebabkan belanja operasional yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan pada tahun sebelumnya.

Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,46% menjadi 10,68%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes turun menjadi Rp4.088.437.191.480, dan belanja tidak terduga turun menjadi Rp4.867.408.385, namun dalam hal ini belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17,82% menjadi 28,50%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja pegawai naik menjadi Rp6.092.077.750.517, belanja bantuan sosial naik menjadi Rp238.268.220.000, dan belanja bagi hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes naik menjadi Rp4.812.323.251.641, namun dalam hal ini belanja operasional yang direalisasikan tahun yang

dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 24,59% menjadi 3,91%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja bantuan sosial turun menjadi Rp41.442.950.000, namun dalam hal ini belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 3,84% menjadi 0,07%, hal ini disebabkan belanja operasional pada belanja pegawai turun menjadi Rp5.869.662.600.252, dan belanja tidak terduga turun menjadi Rp2.662.431.206, namun ini menunjukkan bahwa belanja operasional yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja operasional yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan belanja modal tahun 2015 sebesar 29,29%, hal ini disebabkan belanja modal yang direalisasikan pada tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

yang direalisasikan pada tahun sebelumnya. Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 25,81% menjadi 3,48%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa turun menjadi Rp2.493.431.626.164, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 5,43% menjadi (8,91%), hal ini disebabkan belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp1.454.598.084.464, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,47% menjadi 18,38%, hal ini disebabkan belanja modal pada

belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.042.705.957.394, dan belanja modal naik menjadi Rp1.681.752.306.368, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

Tahun 2019 mengalami kenaikan kembali sebesar 10,62% menjadi 29,00%, hal ini disebabkan belanja modal pada belanja barang dan jasa naik menjadi Rp4.562.499.451.144, dan belanja modal naik menjadi Rp2.099.719.124.860, namun dalam hal ini belanja modal yang direalisasikan tahun yang dihitung lebih tinggi dibandingkan belanja modal yang direalisasikan tahun sebelumnya.

7. Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*)

Tabel IV.9 Penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum
Belanja Wajib dan Pinjaman Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2019

Tahun	PAD (Rp)	Dana Bagi Hasil (Rp)	Dana Alokasi Umum (Rp)
2014	9.916.358.231.432	659.530.315.680	1.803.931.189.000
2015	10.904.825.812.504	569.741.071.740	1.629.429.283.000
2016	11.541.029.720.310	893.673.221.918	1.859.907.223.000
2017	12.547.513.389.400	848.309.911.393	3.652.586.431.000
2018	13.711.836.037.849	769.449.921.024	3.652.586.431.000
2019	14.437.914.236.398	575.968.321.634	3.784.512.513.000

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Tahun	Belanja Wajib (Rp)	Pinjaman (Rp)
2014	2.197.436.487.588	1.689.438.284.603
2015	2.480.896.195.020	1.689.436.791.747
2016	2.567.876.390.675	417.920.564.252
2017	6.092.077.750.517	646.575.639.755
2018	6.468.261.263.572	1.528.916.848.598
2019	5.869.662.600.252	1.630.776.601.765

Sumber: djpk.Kemenkeu.(Diolah)

Berdasarkan tabel di atas bahwa perhitungan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio*) tahun 2014 sebesar 6,03%, tahun 2015 sebesar 6,29%, tahun 2016 sebesar 28,06%, tahun 2017 sebesar 16,95%, tahun 2018 sebesar 7,63% dan tahun 2019 sebesar 7,93%. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR nya berada di atas 2,5.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun anggaran 2014-2019 tergolong efektif tetapi tidak efisien. Hal itu dapat di lihat dari hasil perhitungan masing-masing pengukuran kinerja keuangan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tahun 2014-2019 dikategorikan sangat baik dengan

- rata-rata 58,88%, karena derajat desentralisasi fiskal berada pada interval >50,01%.
2. Rasio Kemandirian Keuangan tergolong tinggi dan sedang. Untuk yang tergolong tinggi termasuk dalam pola hubungan delegatif dan untuk yang tergolong sedang termasuk dalam pola hubungan partisipatif dengan nilai rata-rata 75,52%.
3. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari rasio efektivitas PAD tahun 2014, 2017-2019 tergolong sangat efektif, karena berada pada interval >100%. Sedangkan tahun 2015 tergolong cukup efektif karena nilai rasio yang diperoleh dibawah 100% yaitu 93,23%. Tahun 2016 sebesar 83,56% yang berarti kurang efektif, karena berada pada interval 99%.
4. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari Rasio Efisiensi tahun 2014 sebesar 99,53%, 2016 sebesar 98,58%, 2017 sebesar 96,55%,

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019

dan 2018 sebesar 99,09% tergolong efisien karena berada pada interval di bawah 100%. Sedangkan tahun 2015 sebesar 105,90% dan 2019 sebesar 101,13% tergolong tidak efisien karena berada pada interval di atas 100%.

5. Kinerja Pengelolaan Keuangan jika dilihat dari rasio Keserasian masih lebih besar mengalokasikan Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal. Rasio Belanja Operasi dengan rata-rata 74,12%, sedangkan Belanja Modal dengan rata-rata 25,88%.
6. Rasio Pertumbuhan PAD rata-rata pertumbuhan sebesar 7,82% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Pendapatan sebesar 11,46%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal rata-rata pertumbuhan sebesar 10,56% lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanja operasi sebesar 11,46%.

7. Rasio kemampuan membayar kembali pinjaman tahun 2014-2019 dikategorikan sangat baik, dikarenakan Rasio DSCR berada di atas 2,5.

Saran

1. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi dengan cara lebih meningkatkan jumlah pendapatan daerah agar dapat sesuai atau seimbang dengan realisasi pengeluaran atau belanja daerah yang terjadi pada periode waktu tertentu.
2. Untuk meningkatkan tingkat keserasian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah yang bersangkutan agar lebih mengoptimalkan belanja rutin daerah, yaitu meningkatkan belanja modal guna dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur daerah dan mengurangi belanja operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Penerbit Eirlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.
- _____. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat. UPP STIM YKPN.
- Tobi, M. R., & Idayati, F. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(8).
- Latuny, Elsjamina M. 2016. “ Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Study Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)”. *Cita Ekonomi Jurnal Ekonomi* Vol. X No.3.
- Machmud, M., G. Kawung, Dan W. Rompas. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.14 No. 2: 1-13.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- _____. (2016). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Pramono, J., 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Among Makarti* 7 (13):83-112.
- Rahmawati, N.K.E dan Putra, I.W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*. XV (3).1767-1795.
- Rasdimala1, R. J., Luntungan, Y. A., Dan W. C. Patrick. 2017. Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 17 (1):134-145.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Saputra, R. W. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Ditinjau dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Soelistijono Boedi. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintahan Kabupaten Banjar

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019**

- kalimantan Selatan. *Jurnal Spread* Volume 2 (2): 183-190.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD.
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wahyuddin, W., & Sugianal, N. (2017). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 51-60.
- Wati M.R. dan C. M. Fajar. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi* 1(1): 59–72.
- www.djpk.kemenkeu.go.id